

BAB IV
PERAN MOHAMMAD HATTA
TAHUN 1955-1965

A. Mohammad Hatta Sebagai Kepala Negara

Oleh sebab itu Hatta sangat menyadari akan hal ini bahwa, kedaulatan tidak akan tercipta secara otomatis dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Bila ketidaksabaran menghadapinya, maka akan memudahkan orang untuk mengesampihngkan pedoman serta aturan permainan tadi.

mempunyai kedudukan, karena ia tidak bergabung ke salah satu organisasi atau partai 1956-1957.¹

Sebelumnya pada tanggal 20 Desember 1949, Hatta berhasil membentuk kabinet RIS dengan mengikutsertakan pihak RI (Yogyakarta) serta PMF sebagai berikut:²

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI
1.	Drs. Mohammad Hatta	Perdana Menteri	-
2.	Drs. Mohammad Hatta	Menteri Luar Negeri	-
3.	Anak Agung Gde Agung	Menteri Dalam Negeri	-
4.	Hamengkubuwono IX	Menteri Pertahanan	-
5.	Prof. Mr. Supomo	Menteri Kehakiman	-
6.	Arnold Mononutu	Menteri Penerangan	PNI
7.	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Meteri Keuangan	Masjumi

¹Setelah mundur dari jabatan wakil presiden, Moh. Hatta memang setidaknya masih aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk tidak terpuruk dengan kondisi Indonesia saat itu yaitu sekitar tahun 1956-1957. Ekonomi yang terpuruk dengan inflasi yang tinggi menyebabkan perekonomian masyarakat khususnya menengah ke bawah menjadi sasaran. Lihat, Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).

²Noer, *Mohammad Hatta*, 374.

- Sayang, perkembangan tanah air tidak segera membantu harapan dan pemahaman Hatta. Sesungguhnya, ia mendapat kepercayaan untuk memimpin pemerintahan yang menurut UUD-RIS tidak dapat dijatuhkan. Berbagai aspirasi, tuntutan, dan terutama ketidaksabaran mengurangi pusat perhatian dari usaha pembangunan. Dasar dan kerangka yang ditetapkan seperti dalam UUD-RIS itu dianggap perlu dirombak lebi dahulu, baru masalah lain dapat diperhatikan, seakan demikianlah jalan pikiran yang berkembang ketika itu. Ini berarti sifat federal dari negara harus dirombak.

Setelah Moh Hatta membentuk Kabinet RIS dan ia menjadi perdana menteri sekaligus menteri luar negeri. Masa-masanya banyak sekali masalah -masalah yang harus diselesaikan, karena memang Indonesia baru merangkang menuju perkembangan negara.

Bagi peneliti, belum menemukan sumber yang relevan akan jabatan yang dimiliki oleh Moh. Hatta, bahkan ia juga menjabat sebagai wakil presiden RI saat itu. Sebelumnya dalam buku Deliar Noer, *Biografi Mohammad Hatta*, menjelaskan bahwa pada tahun 1950 anggota pemerintahan bingung menempatkan posisi Moh. Hatta dalam jabatannya, apakah menjabat sebagai wakil presiden RI atau sebagai Perdana menteri. Salah satu tokoh menyebutkan bahwa Moh. Hatta harus memilih salah satu dari jabatan itu, karena tidak mungkin seorang memiliki dua jabatan yang berbeda dan harus mengatur keduanya secara bersamaan. Soekarno pun hanya diam tidak ikut campur atau belum mengetahui tentang masalah ini atau ia tidak mau mengetahui masalah ini, karena pada saat itu ia fokus akan ideologi politiknya akan demokrasi terpimpin.

[illegible]

Namun yang jelas, jabatan apapun yang sedang ditunggangi Moh. Hatta hanya sebagai jubah saja yang ia pakai, karena segala aspirasi politiknya yang ingin ia kemukakan dan ia kembangkan berseberangan dengan kawan sejawat Soekarno. Aparatur pemerintahan sudah dalam pelaksanaan Soekarno yang bagi Hatta itu adalah “kediktatoran”.

Meskipun seperti itu akan kebingungan jabatan Moh. Hatta, yang terpenting bahwa semasa ia dalam pemerintahan ada beberapa kontribusi akan penyelesaian masalah di dalam negeri maupun di luar negeri di antaranya:

Pemerintahan yang bertanggung jawab akan lebih mudah ditegakkan bila lingkungan kepegawaian turut membantu. Lingkungan ini akan terbina dengan lebih baik bila kedudukan pegawai terjamin, baik dalam rangka nafkahnya maupun sistem mutasi dan promosi. Dalam hal ini bisa meningkatkan semangat kerja.

[illegible]

“berhubungan dengan kesukaran hidup sekarang, yang diderita oleh rakyat dan pegawai negeri tidak bijakana gaji presiden dan wakil preisden dinaikkan, apalagi sampai begitu menyolok mata. Tambahan pula kira-kira separuh dari gaji yang begitu besar itu nanti akan kembali lagi ke kas negara berupa pajak.”⁶

Meski Hatta sudah seperti itu para aparatur pemerintahan masih banyak yang tidak mempedulikan aspirasi Hatta, malah terdapat ketimpangan seperti korupsi. Hatta pun tetap dengan penderiannya, ia terus mengingatkan, menyindir, dan mengkritik apa yang sudah mereka lakukan terhadap uang rakyat.

Masalah buruh pun tidak luput dari perhatian Hatta. Kita ingat agaknya bahwa dalam masa pemerintahan RIS, keterangan pemerintah yang diucapkan Sookarno kepada sidang gabungan DPR dan Senat tanggal 15 Februari 1950 menenkanakan kebebasan gerakan buruh. Maksudnya agar keadilan upah dapat berlaku baginya.

Pada tahun 1955, Hatta mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Ali, mengingatkan mengapa usul Kongres Buruh Seluruh Indonesia untuk menaikkan gaji buruh sesuai dengan perkembangan

[illegible]

Masa Demokrasi Terpimpin bukan saja bersangkutan dengan sistem politik, tetapi juga mengedepankan soal-soal masyarakat secara umum, termasuk ekonomi dan pembangunan. Pada tanggal 1959-1965 ini adalah masa Demokrasi Terpimpin yang sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem [demokrasi](#) dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Pengumuman Soekarno mengenai demokrasi terpimpin ini menimbulkan pro dan kontra. Bagi PKI, mereka menyambut dengan hangat keputusan presiden tersebut, sedangkan bagi Moh. Hatta sangat mengecam untuk tidak melakukan hal itu.

⁷Surat Hatta kepada Perdana Menteri Ali, 25 Maret 1955. Lihat, Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).

digulingkan oleh PKI yang dulu ia rekrutnya sendiri dalam partai politik dan kabinet.

Moh. Hatta terus melakukan layangan kritikan dan komen, hingga surat langsung kepada Soekarno untuk menghentikan sistemnya itu. Namun, Soekarno tetap dengan pendiriannya, ia tidak membalas kritikan, komen, dan surat Moh. Hatta. Bukan Soekarno tidak memperdulikan Hatta, melainkan ia malah masih sangat menghormati Hatta. Ia hanya diam dan memenjarakan pemimpin penerbit yang isinya mengenai kritikan Hatta terhadapnya, tapi tidak langsung memberi sanksi kepada Hatta. Akhirnya Hatta pun berhenti melakukan kritikan melalui media, ia langsung mengirim surat kepada Soekarno dan tanggapan Soekarno masih sama.

D. Mohammad Hatta dan Gerakan PKI

Dalam peristiwa Gerakan 30 September, Moh Hatta memang tidak ikut campur secara fisik akan penumpasan atau peredaman gerakan ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya ia lakukan, ia lebih berperan memberikan argument atau kritiknya kepada aparat pemerintahan bahwa ini yang harus dilakukan. Berikut peneliti memaparkan kesaksian Bung Hatta mengenai gerakan PKI, dalam bukunya *Bung Hatta menjawab*, menjelaskan bahwa:

“...Yang penting pertama-tama diketahui adalah tujuan PKI untuk merebut kekuasaan. Dan mereka tahu, bahwa kalau tidak meyakinkan Soekarno dulu, mereka tidak akan mendapat kekuatan. Ini prinsip pokok PKI waktu itu berdasar pengetahuan kita dari sejarah komunis di dunia, sejarah PKI di Indonesia, dan *feeling* berdasar kesadaran kita tentang keadaan masyarakat dan tingkat perkembangannya waktu itu. Kampanye PKI akan memilih Soekarno jadi presiden kalau ia menang dalam Pemilihan Umum tahun 1955, membantu dengan gigih gerakan untuk merebut Irian Barat dengan kekerasan (Trihora) dan gerakan Ganyanhhg Malaysia (Dwikora),

1. Pada tahun 1932

2. Pada tahun 1956

¹⁵Ibid., 179.

“Diktator yang bergantung pada kewibawaan orang seorang tidak akan lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistemnya akan rubuh seperti rumah kartu.”¹⁶

3. Pada Juni 1966

¹⁶Ibid., 181.

¹⁷Ibid., 182.

Dengan kata lain, Hatta membedakan ide dengan praktik. Partai politik yang lahir pada masa demokrasi parlementer memang menunjukkan sisi buruk demokrasi. Partai dibanjiri orang-orang yang berebut posisi, mengincar kedudukan, dan pembagian rezeki. Partai berkembang biak. Anggota partai yang lama memisahkan diri dan membentuk partai yang baru, bukan karena perbedaan ideologis tapi karena persoalan rezeki yang tak merata.

Rakyat mengeluhkan demokrasi: daerah tidak dipedulikan, agenda otonomi diabaikan, tentara perang. Di sinilah Hatta menyimpulkan bahwa demokrasi perlembagaan yang ultrademokratis melahirkan kediktatoran. Katanya, “perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan,

demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk lawannya yaitu diktator.”

Soekarno rupanya tidak tinggal diam saat dikecam. Akhirnya sejumlah surat kabar dibredel *Pikiran Rakjta*, koran yang konsisten mempublikasikan artikel Hatta, dipaksa tak lagi memuatnya. Majalah *Pandji Masjarakat*, yang pertama kali memuat *Demokrasi Kita* juga dilarang terbit dan redaksinya bahkan dibui (dipenjara).

Khawatir kritiknya di muka umum menyusahkan orang lain, Hatta mencari jalan lain. Ia menyampaikan pandangannya melalui surat pribadi. Dengan kalimat lugas, seperti dicatat Mochtar Lubis, Hatta melontarkan kritiknya langsung menuju pokok sasaran. Salah satunya, dalam surat tanggal 12 September 1957, dengan tegas Hatta mengingatkan Soekarno akan niatnya menggunakan tantangan besi mengatasi pergolakan di daerah:

“Soekarno, seterusnya terpikir oleh saya, apakah saudara ingin mengadakan suatu diktator militer Dan yakinlah saudara bahwa diktator semacam itu dapat meliputi seluruh Indonesia yang terbagi-bagi atas sekian banyak pulau? Berhubungan dengan itu, saya sebagai seorang saudara memperingatkan bahwa saudara dengan cita-cita semacam itu berada pada jalan yang berbahaya yang akhirnya merugikan kepada saudara sendiri.”¹⁸

Soekarno jelas menyimpan segan terhadap Hatta. Dalam tanggapannya dalam surat Hatta, ia hampir tak pernah membantah, paling banter Soekarno mengucapkan terima kasih atau sesekali menanyakan kapan mereka bisa bertemu untuk membahasnya.

Sepanjang perjuangan politiknya dalam rentang kurang lebih enam dekade (1922-1980), Hatta praktis selalu siap secara fisik dan mental. Kendati Hatta gagal memperjuangkan aspirasi politiknya, karena berbenturan dengan Soekarno (yang harus diakui memang paling dekat di hati masyarakat bangsa kita), ia berhasil memanjangkan tonggak-tonggak teladan kenegarawanan yang terbukti jauh lebih banyak dan lebih positif mengilhami generasi-generasi sesudahnya.

Merupakan salah satu karya Moh. Hatta yang bagi peneliti sangat fenomenal, karena tertuangkan isi pemikiran dan kritik tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi Kita pertama kali dimuat di majalah *Pandji Masjarakat* yang dipimpin Buya Hamka pada 1960. Namun, justru Buya Hamka pemimpin redaksinya dipenjarakan. Buku tipis 36 halaman ini baru diterbitkan pada Juni 1966 setelah Soekarno jatuh. Pemerintahan melalui keputusan Menteri Jaksa Agung tanggal 30 Mei 1966 mengumumkan bahwa artikel itu boleh diterbitkan dalam bentuk buku. Diterbitkan dalam dua bahasa yaitu Indonesi dan

Beberapa poin yang peneliti ambil dari buku ini akan
gagasan Moh. Hatta, bahwa,

Ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial itu dalam kalbu pemimpin-pemimpin Indonesia di waktu itu. Pertama, paham sosialis Barat yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persatudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Paduan semuanya itu hanya memperkuat keyakinan bahwa bangunan demokrasi yang akan menjadi dasar

Kemudian aspek terpenting dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, dalam segi politik dilaksanakan sistem perwakilan rakyat dengan musyawarah berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi desa yang begitu kuat hidupnya adalah pula dasar bagi pemerintahan autonomi yang luas di daerah-daerah sebagai cermin dari pada pemerintahan dari yang diperintah. Kedua, dalam segi ekonomi semangat gotong-royong yang merupakan kooperasi sosial adalah dasar yang sebaik-baiknya untuk membangun kooperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakyat. Keyakinan tertanam, bahwa hanya dengan kooperasi dapat dibangun kemakmuran rakyat. Ketiga, dalam segi sosial diadakan jaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia bahagia, sejahtera, dan susila menjadi tujuan negara.”¹⁹

[illegible]